



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

Evaluasi Sistem Pungutan Parkir

Konsekuensi



Belum lama ini kita diriuhan atas repson kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Setiap keputusan pemerintah, sudah barang tentu melahirkan pro dan kontra. Hal biasa bagi sebuah negara demokrasi.

Pilihan menaikkan harga BBM bersubsidi, tentu bukan tanpa kajian yang matang. Ada banyak konsekuensi yang telah dikaji dan siap diterima.

Konsekuensi merupakan frasa yang tidak asing lagi bagi kebanyakan orang. Istilah konsekuensi ini merujuk pada akibat dari perbuatan atau tindakan tertentu. Setiap hal yang dilakukan tentunya memiliki sebuah dampak.

Konsekuensi merujuk pada semua akibat atau hasil dari suatu perbuatan. Baik akibat atau hasil tersebut bersifat positif maupun negatif. Penggunaannya sering kali dikaitkan dengan suatu akibat yang harus ditanggung.

Pada edisi kali ini, Cirebon Katon tertarik untuk memilih tema retribusi pada bidang parkir. Terlihat sederhana, sektor parkir nyatanya merupakan penyumbang yang cukup signifikan bagi pendapatan daerah jika dikelola dengan serius.

Kami berkeinginan menyajikan informasi dan melaporkan kondisi sektor retribusi parkir di Kabupaten Cirebon untuk para pembaca budiman. Pastinya dengan senantiasa mengikuti kaidah dan aturan jurnalistik yang ada.

Kami berharap, konsekuensi memilih tema ini pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan retribusi bagi Kabupaten Cirebon yang lebih optimal.

Meski demikian, kami menyadari, informasi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami menunggu masukan dan saran yang membangun dari para pembaca setia. Selamat membaca Cirebon Katon!

PEMBINA/PENASEHAT :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan, S.E.
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

PENGARAH :

Hj Eriati
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

H. Sofwan, S.T
(Ketua Komisi 1)

R. Hasan Basori
(Ketua Komisi 2)

Anton Maulana, S.T, M.M
(Ketua Komisi 3)

Aan Setiawan, S.Si
(Ketua Komisi 4)

PIMPINAN UMUM/PIMPINAN REDAKSI :

Asep Pamungkas, SP, MP
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI :

drh. Encus Suswaningsih M.Si
(Kabag Humas Protokol, Kerjasama dan Aspirasi)

Isnaeni Jazilah, S.H, M.H
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

REDAKTUR PELAKSANA :

Dra. Puti Amanah Sari
(Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda)

REDAKSI AHLI :

S. Yudi

REDAKTUR :

Yusuf

REPORTER :

• **Riyan • Amir**

FOTOGRAFER :

Qusoy

DESAIN GRAFIS :

Boyke Datu

DATA DAN RISET :

Oman

DISTRIBUSI :

Firman • Misbah

KORESPONDENSI:

redaksi.cika@gmail.com

PENERBIT :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon

• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS
Pendapatan Retribusi Parkir
Tak Sebanding Potensi

10 | Pandi SE:
Perlu Evaluasi Sistem Pemungutan



14 | KILAS
Terima Aspirasi Kenaikan Harga BBM



18 | PUBLIKA
Awasi Penyaluran BLT Subsidi BBM



22 | LENS
Geliat Seni Ukir Topeng Pasca Pandemi



24 | PROFIL
Oji Saroji, ST, M.AP
Berlatih Kendalikan Diri dengan Olahraga

28 | DINAMIKA
Rekomendasi Fraksi Perubahan APBD 2022

30 | Dukung Perubahan Klinik Jasa Prima Jadi Rumah Sakit

32 | Ketuk Palu Perubahan APBD 2022

34 | Perda Pengelolaan Sampah Disahkan



36 | POTENSI
Panambangan Bakal Hadirkan Wisata Arung Jeram



38 | DESA
Gembongan
Akan Punya Taman Anggur

Pendapatan Retribusi Parkir Tak Sebanding Potensi

Pendapatan sektor retribusi parkir diakui selalu terealisasi dari targetnya. Sementara DPRD menilai masih jauh dari potensi yang ada.



Sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cirebon diperoleh dari berbagai sumber kekayaan dan retribusi yang sah. Salah satunya pendapatan dari sektor retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum, jalan khusus dan lahan aset pemerintah untuk seluruh kendaraan bermotor.

Peraturan Bupati (Perbup) Cirebon No 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir Pasal I menjelaskan, setiap kendaraan bermotor roda 6 dikenakan biaya parkir sebesar Rp 4 ribu. Semen-

tara roda 3 dan 4 Rp 3 ribu, dan kendaraan roda 2 dikenakan tarif parkir seribu rupiah.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Pengoperasian Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon Alfa menerangkan, tahun 2020 ada 270 tempat yang sudah memiliki izin resmi parkir. Dan telah meningkat pada 2022 menjadi 287 titik lokasi.

“Itu total seluruh kawasan parkir tepi jalan, toko-toko, aset pemerintah,” terangnya.

Alfa mengatakan, setiap tempat parkir resmi terdapat satu juru parkir (jukir) yang dilengkapi rompi, topi dan membawa karcis resmi dari Dishub



bernominal Rp 1.000-5.000. Pada tahun 2021, total petugas parkir berjumlah 495 orang yang bertambah menjadi 530 orang pada 2022.

Para jukir tersebut tidak digaji melainkan diupah dari bagi hasil pendapatan parkir dengan persentase 70 dan 30 persen.

“Untuk daerah 30 persen dan 70 persen untuk jukir,” ujar Alfa.

Dalam teknis pemungutan parkir, Dishub menggunakan koordinator wilayah (koorwil) yang tersebar menjadi koorwil barat, tengah dan timur.

“Kita ada 12 koordinator yang setiap minggu keliling menemui jukir dan akan disetorkan setiap Kamis melalui transfer bank ke Bappenda,” jelas Alfa.

Alfa pun optimistis, retribusi parkir di Kabupaten Cirebon setiap tahun akan selalu meningkat.

Terlebih setelah diserahkan pasar-pasar ke Dishub yang semula dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

“Kita optimis perlahan akan menyulip minimal setara dengan Kota Cirebon yang sudah mencapai Rp 3 miliar,” kata Alfa.

Alfa hanya menyangkan, kondisi jukir yang belum dapat digaji karena belum adanya payung hukum Perbup.

“Kalau ada Perbup setidaknya para jukir mendapat hak dan kita juga enak untuk ngaturnya,” ujar dia.

Sub Bidang Pelaporan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Cirebon Lili Murtsiasih menyampaikan retribusi parkir di Kabupaten Cirebon diakui selalu mengalami peningkatan dari target setiap tahunnya. Pada 2020, Dishub

menargetkan Rp 300 juta namun berhasil terealisasi Rp 331 juta.

Sementara pada 2021, target retribusi parkir dari Rp 270 juta juga berhasil surplus hingga Rp 303 juta. Dan per September 2022, dari target Rp 270 juta, Bappenda telah menerima Rp 383 juta.

“Hanya pada tahun 2019 saja kita tak mencapai target karena pandemi. Dari target Rp 500 juta hanya terealisasi Rp 270 juta. Dan tahun depan kita yakin akan meningkat lagi menjadi Rp 500 juta,” ungkap Lili.

Sementara, target pajak parkir pada 2022 juga diakui mengalami peningkatan. Dari target Rp 560 juta, hingga September 2022 telah terealisasi Rp 579 juta.

“Target pajak perubahan Rp 650 juta. Artinya kita sudah mencapai 89 % untuk mencapai target perubahan itu,” kata Lili.

Bukan Prestasi, Masih Jauh dari Potensi

Meski demikian, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Pandi S.E menjelaskan, pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Cirebon masih jauh dari potensi. Seharusnya realisasi yang dapat diperoleh dari retribusi parkir, mampu mencapai Rp 700-800 juta per tahun.

Pandi melihat, banyak kawasan yang belum tergali dan terdata Dishub. Sehingga klaim realisasi retribusi parkir telah melebihi target bukanlah prestasi. Ia bahkan menilai, Dishub hanya menurunkan targetnya. Dari semula Rp 500 juta pada 2019, target pada 2020 hingga 2022 justru menurun.

“Jadi enggak aneh kenapa melebihi target. Kan targetnya saja diturunkan,” jelas Pandi.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon R Cakra Suseno juga



mengatakan, banyak potensi parkir yang belum tergarap sebagai pendapatan retribusi parkir. Dalam setahun, target retribusi parkir terbilang kecil hanya Rp 330 juta saja.

Cakra menilai, masih banyak parkir liar yang belum terkontrol sehingga ada kebocoran. Dishub bahkan belum melakukan pemetaan total parkir yang dapat digarap.

“Selama ini penetapan per kecamatan tidak sesuai di lapangan. Contohnya, per kecamatan yang setor hanya Rp 10 ribu per hari. Ini sepengetahuan saya,” kata Cakra.

Politisi Partai Gerindra itu bahkan berpendapat, Dishub kurang inovasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ia pun membandingkan dengan Kota Cirebon yang telah menetapkan titik zonasi penarikan retribusi parkir. Sementara Kabupaten

Cirebon belum menetapkan.

Sejauh ini, pemetaan parkir oleh Dishub belum maksimal. Padahal, terdapat titik lokasi bagus yang bisa menambah target pendapatan.

“Misalnya di Sumber saja, potensinya bagus. Tetapi lebih banyak dugaan punglinya dan hal ini harus ditertibkan. Caranya bisa diberikan ada pengesahan supaya tidak liar,” jelas Cakra.

Sehingga jika Dishub mampu memetakan potensi lokasi parkir, bukan tidak mungkin target retribusi mampu mencapai Rp 14 miliar dalam setahun.

Saat Dishub telah menguji coba di Pasar Pasalaran dengan mengambil alih retribusi parkir itu merupakan tindakan bagus. Namun, itu pun belum optimal karena baru di dalam pasar, sementara pinggir jalan belum digarap.

“Ini kan tinggal dipetakan

saja. Pasar Babakan sepengetahuan saya, bahkan hanya Rp 70 ribu per Minggu, itu seingat saya kalau tidak salah. Kalau retribusi dikelola Dishub dengan baik, maka PAD dari sektor retribusi parkir itu bisa meningkat. Dan itu bisa dilakukan di 9 pasar daerah terlebih dahulu,” tegasnya.

Target Rp 370 juta dari retribusi parkir dalam setahun, kata Cakra, masih sangat kecil dan tidak berbanding lurus dengan potensi yang ada. Sebut saja populasi kendaraan di Kabupaten Cirebon yang kurang lebih berjumlah 400 ribu kendaraan dalam sehari, mestinya retribusi parkir bisa sangat signifikan.

“Artinya, masih jauh sekali. Kalau dilihat dari populasi kendaraan retribusi parkir itu harusnya besar sekali. Ini harus dipikirkan oleh Dishub mengapa masih ratusan juta retribusi parkir kita,” pungkasnya. •Suf

Dishub: Banyak Jukir Liar

Dishub menceritakan masih banyak tempat parkir yang dikuasai jukir liar. Tak jarang, Dishub harus berurusan dengan mereka.



DPRD Kabupaten Cirebon menilai, pendapatan sektor retribusi parkir di Kabupaten Cirebon masih jauh dari potensi seharusnya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Pandi mengatakan, belum semua tempat parkir telah terjamah Dinas Perhubungan (Dishub). Sebaliknya, banyak toko atau tepi jalan yang belum memiliki juru parkir (jukir) resmi. Bahkan lebih parahnya enggan untuk menggunakan jukir dari Dishub.

“Memang capaian retribusi parkir mengalami peningkatan setiap tahunnya tapi jauh dari potensi. Seharusnya retribusi parkir bisa lebih tinggi dari se-

karang jika dikelola dengan baik,” ujar Pandi.

Politisi PKB itu pun menyoroti masifnya keberadaan parkir liar karena ketidaktegasan Dishub.

Selain itu, Pandi melihat jumlah juru parkir resmi Dishub yang dianggap masih sangat kurang. Sehingga perlu penambahan personel jukir sesuai dengan kebutuhan. Tak lupa, Dishub harus lebih tegas dan mengevaluasi manajemen pengelolaan parkir.

“Menurut kami manajemen rekrutmennya kurang jelas, dan penguasaan wilayahnya juga enggak jelas. Belum lagi tidak ada keberanian dari kita untuk memberikan *warning*. Karena kami juga sadar me-



foto: mediarehron.id

mang masih banyak juru parkir liar yang berkeliaran,” tegasnya.

Selain penambahan personel jukir dan pemetaan wilayah, Pandi mengingatkan agar Dishub juga memperhatikan fasilitas para jukir. Idealnya juru parkir resmi menggunakan karcis, maka Dishub harus memastikan adanya karcis sesuai dengan standar yang pemerintah buat.

“Kemudian untuk pelayanan jukir juga masih kurang. Kita tidak tahu seperti apa koordinasi karena saya yakin banyak yang tidak menggunakan karcis. Padahal idealnya kan harus pakai karcis. Jangan hanya mikirin target setoran saja,” jelas Pandi.

Meski selama ini masih mencapai target, retribusi parkir perlu dibenahi dengan mekanisme baru agar pendapatan sektor parkir bisa lebih tinggi sesuai dengan potensi yang ada. Selama ini regulasinya masih berpacu

pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Sementara untuk toko-toko belum ada Perbup yang mengatur.

“Yang saat ini berjalan itu sistemnya per lapak atau per meter. Kadangkala setorannya tidak sesuai dengan Perbup. Inilah kenapa harus ada mekanisme baru agar pendapatan lebih optimal,” kata dia.

Dia juga menambahkan, Dishub jangan sampai lengah hanya karena target tercapai. Pasalnya masih ada pekerjaan 40 persen lokasi yang belum tergarap. Dan itu harus segera diambil alih. Jika dibandingkan dengan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon masih tertinggal jauh.

“Kalau seperti ini terus masalah parkir tidak akan beres. Lagian sebenarnya kita masih rendah jika dibandingkan dengan

kota. Perbup sudah basi dan harus ada perubahan,” katanya.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Pengoperasian Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon Alfa mengakui masih ada sejumlah tempat yang belum memiliki jukir resmi. Penyebabnya pun beragam, Para pemilik toko misalnya, enggan menggunakan jukir karena khawatir omzet pendapatan berkurang.

Sejumlah 40 % toko, diakui tak memakai jukir resmi melainkan jukir liar karena pemilik toko ingin tambahan pemasukan dari setoran parkir.

Lebih parahnya, Alfa mengatakan, saat Dishub memaksa menempatkan jukir resmi, tidak sedikit pemilik toko mengadu ke kepolisian. Tak jarang jika ia dan timnya kerap mendapat panggilan dari polsek setempat.

“Kami pernah dipanggil Polsek Panguragan, tentang kelu-



han salah satu tokoh pemuda di sana yang menolak adanya juru parkir, karena dari pihak perusahaan mengaku omzetnya berkurang,” kata Alfa.

Selain menggunakan jasa polisi, salah satu pemilik toko bahkan pernah memakai jasa pengacara untuk menolak adanya juru parkir dari Dishub.

“Saya heran saja, kenapa jukir yang memiliki legalitas resmi ditolak, tapi malah mereka yang tidak punya legalitas diterima,” kata dia.

Alfa mengakui, saat mengelola parkir, berarti Dishub harus siap berurusan dengan masyarakat kelas menengah ke bawah. Khusus di Kabupaten Cirebon, tidak jarang Dishub harus bertikai dengan kelompok masyarakat tertentu yang berkepentingan.

“Mulai dari unsur LSM, or-

mas, dan pihak desa. Kita sering berurusan soal parkir dengan mereka. Pernah juga kita ditemui Pemdus karena ingin lokasi parkir justru dikelola Bumdes,” tutur Alfa.

Tak ayal bukan sesuatu yang baru jika Dishub harus terlibat cekcok dengan tokoh pemuda setempat saat ingin mengelola parkir. Keadaan itu diperparah, karena para jukir liar justru menggunakan atribut resmi untuk mengecoh Dishub.

Atribut topi dan rompi bertuliskan Dishub Kabupaten Cirebon, kata Alfa, diakui telah dijual bebas di toko-toko. Akibatnya banyak disalahgunakan para jukir liar.

Alfa sangat tak setuju ketika rompi Dishub untuk juru parkir dijual secara umum. Namun ia pun tak dapat berbuat banyak dan tak ingin memperpanjang masalah. Ia khawatir para koor-

dinator wilayah (koorwil) jukir resmi harus menerima ancaman saat di lapangan.

“Beberapa keluhan dari juru parkir kami memang mendapat ancaman dari orang pribumi, entah dari ormas tertentu atau pemilik toko,” ungkapnya.

Jika harus memberantas jukir liar secara langsung, bukanlah satu hal mudah. Alfa menyadari, banyak para jukir liar mengandalkan kehidupannya dari pekerjaannya menjadi tukang parkir.

Sepengalaman Alfa, menertibkan juru parkir yang belum memiliki legalitas lebih mudah dibanding harus berurusan dengan pihak lain yang berkepentingan.

“Kalau kita melegalkan petugas parkir yang sudah lama gampang. Dibanding kita menaruh petugas parkir dadakan. Tapi masalahnya ada oknum-oknum di belakangnya yang memang menerima setoran dari jukir liar. Itu yang sulit,” tutur Alfa.

Oleh karenanya, Alfa mengingatkan, pentingnya kesadaran masyarakat, lebih khususnya para pemilik toko dan usaha untuk memastikan tempat parkir dikelola jukir resmi. Dengan adanya jukir resmi, bukan semata untuk redistribusi daerah saja melainkan ketertiban lalu lintas juga terwujud.

“Kesadaran toko juga masih rendah, padahal jukir bukan hanya untuk PAD saja, tapi juga untuk pengendalian lalu lintas,” jelasnya.

Selain itu, Alfa berharap si-nergitas dari seluruh elemen untuk mencegah kebocoran PAD karena banyaknya jukir liar.

“Kami tentu tak bisa sendiri untuk menyelesaikan kebocoran parkir ini. Perlu semua dinas dan masyarakat membantu kami untuk optimalkan redistribusi parkir,” tandasnya. •Par

Pandi SE: Perlu Evaluasi Sistem Pemungutan

Untuk mencegah kebocoran PAD, Komisi II berpendapat, Dishub harus evaluasi dan libatkan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi parkir. Bagaimana caranya?



Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon berupaya memperbaiki kebocoran PAD dari retribusi parkir akibat ulah parkir liar. Mereka berencana menambah titik parkir yang akan dikelola. Dishub akan menyosialisasikan terlebih dahulu ke seluruh toko agar pengelolaan parkir dapat melibatkan juru parkir (jukir) resmi.

“Kita akan kirim surat pemberitahuan terlebih dahulu ke toko-toko. Jika bersedia kita langsung ke lapangan. Tapi biasanya tak semua merespon surat dari kami,” ujar Alfa, Analis Kebijakan Ahli Muda Seksi Pengoperasian Prasarana Dishub Kabupaten Cirebon.

Alfa mengatakan, dengan mengoptimalkan toko yang belum memiliki jukir resmi, diharapkan dapat menambah retribusi parkir. Ia pun telah siap jika pada akhirnya harus berhadapan dengan oknum

jukir liar maupun premanisme.

Selain itu, Dishub juga mengupayakan penambahan lokasi parkir hingga ke desa bekerjasama dengan pemerintah desa.

“Kita melakukan kerjasama dengan desa. Karena kadang parkir di desa dikelola Bumdes padahal itu jalan Kabupaten. Jadi kita harus sinergi agar ada kontribusi ke daerah,” ujarnya.

Tak kalah penting, Dishub juga mengedukasi 530 jukir sebagai bentuk penguatan dan kepedulian.

“Kita optimalkan pendistribusian atribut juru parkir resmi seperti, rompi, topi dan lampu tangan untuk keamanan saat malam hari,” kata Alfa.

Alfa berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon juga harus memikirkan nasib kesejahteraan para jukir. Sejauh ini, jukir hanya menerima penghasilan dari persentase pembagian hasil parkir. Hal



itu pun dijamin Kepala Dishub Kabupaten Cirebon Asdullah. Ia mengatakan, para jukir merupakan pahlawan bagi daerah sehingga sudah sepatutnya daerah memikirkan kesejahteraan mereka.

Asdullah beberapa kali melihat langsung kondisi jukir yang terlihat hanya dipaksa mengejar target. Sementara Pemkab sendiri belum dapat memberikan apa-apa.

“Makanya saya berniat memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan untuk juru parkir maupun keluarganya. Perhatian ini agar jukir merasa memiliki tanggungjawab serupa dan semangat dalam bekerja,” jelas Asdullah.

Sementara untuk menertibkan jukir liar, Asdullah juga tengah berupaya membangun komunikasi intens dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir liar termasuk para LSM, ormas maupun pengelola. Diharapkan melalui sosialisasi dan edukasi secara kemanusiaan, tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

“Kita tahu premanisme tidak bisa dihindarkan karena mereka nyari makan di situ. Tetapi setidaknya kita bisa saling kerjasama atau minimal bagi hasil. Untuk makan mereka ada, dan untuk retribusi ke daerah juga ada,” kata Asdullah.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Pandi menilai, perlu ada mekanisme perekrutan jukir yang jelas jika ingin kesejahteraan jukir resmi dapat terwujud.

“Seharusnya diperjelas posisinya, kontrak atau pegawai tetap. Kalau misalkan status kontrak kita tidak perlu memberi pelayanan apa-apa, tapi kalau dia pegawai kita upayakan jaminan kesehatan, upah dan sebagainya,” ujar Pandi.

Pandi pun berpendapat agar Dishub maupun Bapenda segera memperbaharui mekanisme aturan pemungutan sekaligus perekrutan jukir.

Sejauh ini, Pandi menilai mekanisme pemungutan tarif parkir yang dilakukan Dishub sangat rawan bocor dan lemah. Sehingga pendapatan retribusi parkir tak sebanding potensi. Ia mengingatkan, Dishub perlu mengevaluasi sistem dan manajemen untuk mencegah kebocoran PAD kembali.

Pandi pun berpendapat agar manajemen pengelolaan dan pemungutan parkir melibatkan pihak ke 3 secara profesional.

“Pendapat kami di Komisi II, Dishub atau Bapenda pake manajemen pihak lain. Misalnya pakai sistem bayar diawal supaya pendapatan jelas tidak ada kebocoran setiap tahunnya,” katanya.

Dengan begitu, pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan adanya kebocoran retribusi parkir. Pandi meyakini dengan sistem tersebut, juga akan lebih meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan potensi wilayah yang ada di Kabupaten Cirebon.

“Dengan menggunakan pihak ke 3 dan bayar diawal pendapatan juga sudah jelas per tahun. Dan Dishub tidak perlu memikirkan kondisi lapangan,” jelas Pandi. •Par

Belajar dari Kabupaten Tuban Retribusi Parkir Tembus Miliaran

Setelah menerapkan sistem parkir berlangganan, retribusi parkir di Kabupaten Tuban mampu mencapai miliaran dalam setahun. Terbesar Rp 8 miliar. Bagaimana bisa?



Foto: Fanpage Facebook: Parkir Berlangganan Kabupaten Tuban

Bangga. Kata yang tepat disematkan Pemerintah Kabupaten Tuban setelah menuai apresiasi banyak pihak karena keberhasilannya dalam mengelola parkir. Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tuban Gunadi menuturkan, banyak kabupaten atau kota yang melakukan studi banding ke Dishub Tuban.

Sejak Agustus 2017 silam, Pemerintah Kabupaten Tuban mulai menerapkan sistem parkir berlangganan di tepi jalan umum bagi kendaraan yang teregistrasi di daerah tersebut.

Penerapan parkir berlangganan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, tentang Retribusi Pelayanan Parkir di

Tepi Jalan Umum dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017.

Peraturan tersebut mengatur kewajiban parkir berlangganan yang meliputi, sepeda motor Rp 20 ribu per tahun, mobil dengan berat 3.500 kg Rp 40 ribu per tahun, dan mobil berat di atas 3.500 kilogram Rp 60 ribu per tahun.

Sejak diluncurkan, target dan penerimaan retribusi dari parkir berlangganan pun meningkat drastis. Gunadi menerangkan, pada 2016 sebelum penerapan parkir berlangganan realisasi penerimaan retribusi parkir hanya memperoleh Rp 789,708 juta dari target Rp 1,50 miliar.

Namun pada 2017, sebagai awal penerapan parkir berlangganan, realisasi penerimaan retribusi

parkir berlangganan melonjak drastis sebesar hingga mencapai Rp 3,703 miliar atau naik 468 persen.

Pada 2018 realisasi penerimaan retribusi parkir kembali meningkat sebesar Rp 8,3 miliar. Sedangkan pada 2019 nilai retribusi parkir mampu mencapai Rp 8,4 miliar. Hanya pada 2020 sedikit menurun meskipun tidak signifikan, yakni Rp 7,1 miliar.

Sementara selama satu semester atau per Juli 2022, nilai retribusi parkir mampu mencapai Rp 3,5 miliar dari targetnya Rp 8,5 miliar.

Selanjutnya, hasil pendapatan dari retribusi parkir, Pemkab Tuban membaginya untuk 3 instansi. Sebesar 82% didistribusikan untuk pemerintahan daerah, 13% untuk pemerintahan provinsi dan 5% untuk Kepolisian Resort Tuban dengan perjanjian kerjasama.

Upaya Pemkab Tuban menelurkan aturan parkir berlangganan, diakui mampu mengatasi kebocoran retribusi akibat premanisme, maupun parkir liar. Sehingga turut meningkatkan pendapat asli daerah (PAD).

Apa yang dicapai Pemkab Tuban tersebut tidak mudah membalik telapak tangan. Gunadi menjelaskan, dalam pelaksanaannya, ia melibatkan banyak pihak. Dishub sebagai penanggungjawab pelaksana, Samsat sebagai penerima retribusi parkir dan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai pengelola administrasi keuangan.

Selanjutnya, Gunadi juga bekerjasama dengan Bank Jatim untuk menyimpan hasil retribusi parkir, Satlantas Polres dan juru parkir.

Gunadi menuturkan, para juru parkir juga diberikan gaji sebesar Rp 1 juta dalam sebulan. Sehingga juru parkir mampu



bekerja dengan baik dan sesuai aturan.

Penanggungjawab Kebijakan Parkir Berlangganan Kabupaten Tuban Erna mengungkapkan, sebelum bekerja, juru parkir dipastikan telah dibekali informasi tentang standar operasional pelaksanaan (SOP) di lapangan.

“Setiap 3 bulan sekali juru parkir juga dibina dan dievaluasi. Dinas memberikan informasi bahwa tidak boleh lagi ada pemungutan parkir di jalan karena sudah diterapkannya parkir berlangganan. Apabila ada yang

memberikan, maka petugas wajib menjalankan SOP dengan menolaknya,” ungkap Erna.

Sejauh ini, Dishub Kabupaten Tuban telah memperkerjakan juru parkir sebanyak 138 orang. Mereka bekerja selama kurang lebih 15 jam dengan sistem *shift*, dan ditempatkan di tepi jalan umum maupun titik keramaian.

Dishub telah melengkapi para juru parkir tersebut dengan fasilitas pendukung seperti sepasang pakaian dinas harian, kaos, rompi, topi, sepatu, jas hujan, kartu pengenalan, dan peluit. •**Muizz**

Terima Aspirasi Kenaikan Harga BBM

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus Cirebon melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai sangat membebani masyarakat.

Dalam demonstrasi tersebut, mereka menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya, meminta pemerintah agar kembali menurunkan harga BBM bersubsidi, mengawasi secara optimal terhadap jalannya pendistribusian BBM bersubsidi agar lebih

tepat sasaran, memberikan transparansi penggunaan dana APBN untuk BBM bersubsidi, dan memberantas adanya oknum dan mafia migas.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi, M.Si menerangkan jika kenaikan BBM subsidi merupakan kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian ia akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa tersebut kepada pemerintah pusat.

"Kami menyambut baik demonstrasi seluruh teman-teman mahasiswa. Sebagai wakil rakyat daerah tuntutan ini akan segera kami sampaikan ke pusat," kata Luthfi.



Usulan Penambahan Kuota PPPK Nakes

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menerima rapat audiensi sejumlah anggota Forum Pejuang Honorer Nakes Indonesia Cirebon (FPHNIC), terkait tuntutan penambahan kuota formasi pada penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) untuk tahun 2023.

“Kami minta di tahun 2023 semua nakes diajukan ke PPPK. Kemudian, kedua kami ingin menindaklanjuti rekomendasi Bupati Cirebon pada bulan April lalu, bahwa dari Pemda akan memberikan honorarium kepada 1.500 tenaga kesehatan (nakes). Besarnya se-

jumlah Rp 250-300 ribu,” kata Sarniti, Ketua FPHNIC.

Menanggapi itu, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Nurholis menyambut baik, upaya forum nakes dalam memperjuangkan tenaga honorer. Ia pun berjanji akan membahasnya dalam rapat bersama BKPSDM agar penambahan kuota P3K bagi nakes dapat terwujud pada 2023 nanti.

“Harapan kami dari tuntutan tersebut, akan ada penambahan P3K minimal bisa mencapai 10 %. Kirakira sejumlah 400 tenaga honorer nakes bisa diangkat menjadi P3K di 2023 nanti,” tandasnya.



Buka Masa Sidang Tahun 2022-2023

DPRD Kabupaten Cirebon kembali melakukan rapat paripurna untuk membahas sejumlah agenda sidang terdekat. Diantaranya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2023, perubahan Propemperda 2022, penutupan sidang 2021-2022 dan pembukaan tahun sidang 2022-2023, serta pengumuman penetapan evaluasi Gubernur terhadap APBD 2021.

Rapat paripurna yang bertempat di ruang Abhi-

mata DPRD Kabupaten Cirebon tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Rudiana dan dihadiri langsung Bupati Cirebon Drs Imron, M.Ag.

Acara yang berlangsung pada Jumat 30 September tersebut, diakhiri dengan penyerahan naskah hasil kinerja DPRD tahun sidang 2021-2022, yang sebelumnya dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka. Hal itu pun menjadi penanda pembukaan tahun sidang 2022-2023.



Dukung Pengembangan Mangrove

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi mengunjungi kawasan ekowisata hutan mangrove yang berlokasi di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan. Dalam kegiatan itu, Luthfi menemukan sejumlah masalah yang berpotensi menjadi kendala untuk pengembangan wisata mangrove kedepannya. Seperti masalah sampah dan pencemaran air sungai akibat tercampur limbah.

Limbah industri dan rumah tangga diketahui sejak lama mencemari aliran Sungai Singaraja. Dimana hal tersebut telah mengubah warna sungai yang

dahulu jernih berubah warna menjadi hitam pekat. Luthfi mengatakan, solusi untuk mengentaskan masalah tersebut harus segera upayakan agar wisata mangrove dapat berkembang.

Sebagai langkah awal, Luthfi mendorong revitalisasi TPS agar sampah di Desa Pengarengan dapat tertangani. Selanjutnya, Sungai Singaraja akan dikeruk agar kembali jernih.

“Tadi kita sudah diskusi dengan pemuda dan Pemdes Pengarengan. Kita sangat mendukung agar wisata mangrove ini dapat berkembang,” tandas Luthfi.



Mohon Cegah Aksi Perundungan Difabel

Assalamu'alaikum wr wb.

Aksi perundungan (bullying) disertai kekerasan yang dilakukan sekelompok remaja berseragam SMA di Kabupaten Cirebon belum lama ini membuat geram banyak pihak. Betapa tidak, aksi tak beradab tersebut mereka lakukan terhadap seorang remaja berkebutuhan khusus.

Dalam video berdurasi singkat yang viral di jagat maya, terlihat korban dianiaya dengan cara ditendang dan diinjak oleh pelaku hingga menangis.

Aksi penganiayaan tersebut sekaligus menjadi salah satu indikator belum ramahnya lingkungan terhadap para kelompok disabilitas. Saya kira, DPRD perlu mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon agar dapat memberi perhatian kepada kelompok berkebutuhan khusus. Misalnya, dengan memberi pemahaman serta edukasi kepada masyarakat, sehingga kejadian perundungan bisa dicegah. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

(Soni/Mahasiswa/Bojong Kulon)



Awasi Penyaluran BLT Subsidi BBM



Yang terhormat Bapak/Ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Saya Iyon (bukan nama sebenarnya) asal Desa Arjawinangun. Kabar baik bahwa pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk subsidi BBM belum lama ini.

Meski begitu, praktik penyaluran BLT sering kali dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan. Tak sedikit, pungutan berkedok sumbangan terjadi saat proses penyaluran BLT.

Tindakan tersebut tentu tak dapat dibenarkan karena melanggar aturan. Oleh karenanya saya mengimbau agar praktik pungli sumbangan dapat dicegah. Meski nilainya tidak begitu besar, namun tetap saja pelanggaran. Kami masyarakat Arjawinangun berharap DPRD Kabupaten Cirebon dapat lebih aktif mengawasi penyaluran BLT BBM kepada masyarakat, Terimakasih.

(Iyon/Buruh/Arjawinangun)

Laporan Pencatutan NIK oleh Parpol

Salam hormat bapak/ibu DPRD Kabupaten Cirebon, semoga senantiasa diberi kelancaran dalam menunaikan tugas-tugasnya. Saya Dedi (27) warga Desa Mertapada Wetan. Saya ingin melaporkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik pribadi saya dicatut oleh partai politik (parpol) baru. Saya sedikit terkejut ketika cek di website milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tertera dengan jelas, bahwa nama saya telah tercantum sebagai anggota salah satu parpol. Hal serupa juga dialami oleh salah satu teman saya lainnya. Mengingat pesta demokrasi yang sudah didepan mata, saya khawatir potensi penggunaan NIK tanpa izin oleh oknum tak bertanggung jawab menjadi lebih masif.

Saya berharap, DPRD Kabupaten Cirebon turut mengawasi hal tersebut bersama Bawaslu dan KPU agar ada tindakan kepada oknum yang mencatut NIK seseorang tanpa izin pemilik.

(Dedi/Aktivis/Martapda Wetan)

CARI

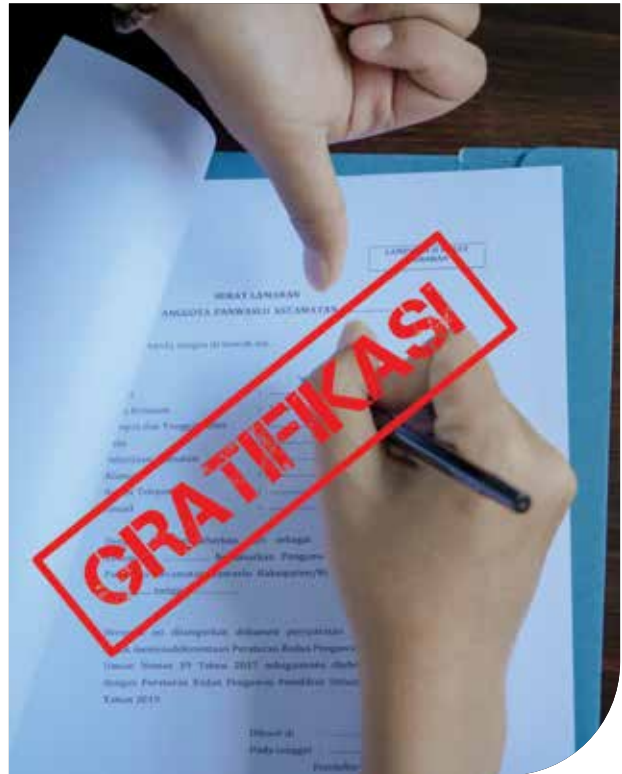
Hasil Pencarian : Hasil Pencarian :

Nik : ██████████
 Nama : ██████████
 Partai Politik : Partai ██████████
 ██████████

| Terdaftar Dalam Sipol

Untuk Informasi Lebih Lanjut, Silahkan menghubungi Partai Politik setempat atau kunjungi PPID KPU melalui website ppid.kpu.go.id dan Silahkan mengisi Form Tanggapan Masyarakat Pada website helpdesk.kpu.go.id/tanggapan

Rekrutmen Panitia Pemilu Rawan Gratifikasi



Assalamu'alaikum wr wb

Terimakasih sebelumnya kepada Cirebon Katon berkenan menerbitkan. Saya Ihsan (bukan nama sebenarnya) asal Desa Plered. Tak lama lagi, KPU dan Bawaslu mulai melakukan pembukaan kepada masyarakat yang berkenan menjadi adhoc atau panitia pemilihan umum (Pemilu) untuk tahun 2024.

Namun proses seleksi panitia pemilu sering kali rawan adanya gratifikasi. Banyak pihak menduga proses tersebut hanya sekadar formalitas saja karena para calon kandidat telah diplot untuk posisi tertentu dan diharuskan membayar.

Meski baru bersifat dugaan, bukan tak mungkin hal itu dapat terjadi. Kami berharap Pemilu 2024 dapat berjalan secara adil dan jujur. Dan itu dapat diwujudkan salah satunya melalui panitia yang netral. Oleh karenanya kami ingin ada upaya transparansi dan kontrol yang ketat pada tahap seleksi panitia pemilu.

Wassalamu'alaikum wr wb.

(Ihsan/Mahasiswa/Plered)

Batik Buana Mas

Dulu Dijual Jalan Kaki, Kini Punya Pelanggan Luar Negeri

Semula Elivinia hanya menjual batiknya dengan berjalan kaki. Hingga suatu hari ia mulai mengikuti pameran dan membuatnya berubah. Bagaimana kisahnya?



Tak hanya dikenal karena keberadaan makam keramat wali, Kabupaten Cirebon juga salah daerah yang masyhur para pengrajin batik.

Tak sedikit, para pengrajin batik ini telah sukses dan menginspirasi bagi kebanyakan orang.

Salah satunya Elivinia. Perempuan 55 tahun ini merupakan pengusaha batik khas Cirebon bernama Buana Mas.

Sudah 32 tahun lamanya Elivinia menggeluti batik. Bukan tanpa alasan, ia ingin melanjutkan bisnis orang tuanya. Darah bisnis pun mengalir dalam dirinya. Meski demikian, Elivinia memilih membangun usahanya sendiri.

Saat merintis, beragam strategi penjualan pernah Elivinia lakukan. Ia memulainya dengan berjalan kaki menawarkan batik Buana Mas ke rumah-rumah warga.

Selepas itu, ia mencoba menjajakannya di pasar kota-kota besar.

“Zaman dulu lebih tangguh. Saya harus membawa banyak barang produksi batik saya untuk ditawarkan ke toko-toko maupun pelanggan di luar daerah,” ungkapnya.

Namun Elivinia begitu optimis bahwa proses tak menghianati hasil. Ia memutar otak agar bisnisnya terus berkembang. Setelah enam tahun merintis, ia ber-



gabung dengan *Asosiation Women Club International* dan seringkali mengikuti pameran batik.

Sejak mengikuti pameran batik, kerja keras itu mulai terlihat hasilnya. Barang dagangannya semakin diminati pembeli. Pernah dalam satu pameran batik di Sukabumi, batik Elivinia banyak terjual hingga mendapat penghargaan.

"Alhamdulillah saat mengikuti pameran, saya selalu dinanti ba-

nyak pelanggan. Saya juga pernah mendapat pelanggan yang berani membayar dulu 200 potong kain batik padahal barangnya masih proses produksi," jelasnya.

Saat ini, pemilik UMKM Buana Batik Mas tersebut, telah memiliki sekitar 500 karyawan. Harga batik yang ia jual bervariasi. Dari harga Rp 100 ribu hingga Rp 1,5 juta. Tak aneh omzetnya kini mampu mencapai Rp 400

sampai Rp 500 juta dalam bulan.

Elivinia berhasil memanfaatkan media sosial untuk memasarkan batik miliknya.

"Dengan memaksimalkan media sosial mulai dari whatsapp hingga instagram, Alhamdulillah sekarang saya punya banyak pelanggan tetap," katanya.

Kini barang dagangannya telah terjual ke seluruh provinsi Indonesia. Bahkan tak hanya dalam negeri, produknya kini merambah hingga ke pasar luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Jepang.

Batik Buana Mas berjenis tulis dan cap dari kain katun dan sutra. Beragam motif pun tersedia. Dari megamedung, kompeni, hingga kawung yang telah dimodifikasi.

Di balik kisah suksesnya, Elivinia selalu mengikutsertakan keluarga. Ia ingin memberi bekal masa depan kepada anaknya agar kelak juga menjadi pengusaha.

"Sekarang usaha saya banyak dibantu oleh anak saya bernama Sheika yang kini duduk di bangku kuliah semester akhir prodi tata busana," tuturnya.

Bagi Elivinia, menjadi pengusaha batik sudah mendarah daging dalam diri keluarga. Karena itu ia bersiap mengikuti tren yang sedang berkembang, agar produksi batiknya tetap diminati banyak kalangan tak memandang status sosial.

"Mau tidak mau, saya harus bisa mengikuti tren yang sedang berkembang sih. Misalnya tidak harus baju formal, baju santai juga bisa di desain batik," kata dia.

Elivinia hanya berharap, pameran batik dapat menjadi program prioritas Pemkab Cirebon. Tujuannya agar pelaku UMKM batik bisa mengikuti tren. Sehingga batik khas Cirebon tetap mendarah daging dan terawat. • **Muizz.**

Geliat Seni Ukir Topeng Pasca Pandemi

Selain menjadi tempat lahirnya para maestro seni, Desa Slangit juga dikenal sentra penghasil kerajinan topeng khas Cirebon.

Selapas pandemi, geliat bisnis di sektor industri kreatif ini mulai kembali mengalami peningkatan.

Salah seorang pengrajin topeng asal Desa Slangit, Wasnadi, telah menahun menggeluti seni ukir kayu.

Dalam sebulan, ia sanggup menyelesaikan puluhan pesanan seni topeng.

Bagi Wasnadi, membuat topeng lebih dari sekadar hobi. Tak aneh orang di sekelilingnya mengenal Wasnadi sebagai pribadi yang sangat tekun.

Saat datang pesanan, Wasnadi akan mengerjakannya hingga larut subuh.

"Kalau lagi banyak orderan kadang jam 4 subuh baru istirahat. Jadi masuk azan subuh saya baru berhenti," kata Wasnadi terkekeh. •Mir





Didin Jaenudin, MM

Piawai Ciptakan Suasana Belajar Nyaman

Karena kepiawaiannya memimpin sekolah, ragam prestasi sekolah ditorehkan.
Bagaimana perjalanan sosok kepala sekolah ini?



Humoris, energik nan berprestasi. Itulah sekilas kesan yang menggambarkan sosok satu ini. Pembawaannya yang tenang tanda banyaknya pengalaman.

Adalah Didin Jaenudin, yang saat ini menjabat kepala sekolah SMP Negeri 1 Sumber. Didin mengawali karirnya sebagai guru pendidikan jasmani dan olahraga (PJOK) di SMP Negeri 1 Lemahabang pada 1994 hingga tahun 2006. Didin dikenal seorang guru yang bisa membuat suasana kelas terasa menyenangkan.

Di tahun 2006, Didin dipindah tugaskan ke SMP N 2 Susukan Lebak dan sempat menjabat wakil kepala sekolah. “Dan ini menjadi titik awal saya dipromosikan menjadi kepala sekolah,” ujarnya.

Benar saja selepas empat tahun, Didin untuk pertama kalinya diamanahi menjadi kepala sekolah SMP N Satu Atap Losari. Baru 7 bulan berselang, Didin dipercaya untuk memimpin SMP N 1 Greged. Baru di tahun 2012 ia kembali ke SMP N 2 Susukan Lebak. “Bedanya saat itu saya datang kembali sebagai keposek,” ungkapnya menceritakan.

Empat tahun berikutnya, giliran SMP N 1 Lemahabang yang menjadi tempat perlabuhan Didin mematangkan kepemimpinannya. Kurang lebih 6 tahun Didin menduduki jabatan kepala sekolah. Selama itu pula, berbagai pembangunan sarana sekolah SMP N 1 Lemahabang digencarkan. Antara lain, Didin berhasil membangun musala 2 lantai, ruang kelas 2 lantai, dan ruang diskusi siswa.



“Karena siswa banyak dan bangunan tidak dapat menampung sehingga menghambat kegiatan belajar mengajar. Makanya kita inisiasi penambahan ruang kelas lagi. Kenapa saya pilih dua lantai, karena luas wilayah yang kurang memadai,” jelasnya. Bagi Didin, fasilitas yang memadai akan menciptakan kegiatan belajar yang nyaman.

Selain pembangunan infrastruktur, beragam prestasi pun ditorehkan. Salah satunya penghargaan juara 2 sekolah sehat tingkat provinsi.

Selesai dari situ, Didin diamanahi menjadi kepala sekolah

SMP N 1 Sumber hingga sekarang. Selama memimpin sekolah tersebut, Didin telah membuat banyak perubahan bagi kemajuan sekolah. Baginya, kenyamanan menjadi hal terpenting untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar menjadi efektif.

“Ketika fasilitas lengkap, rapih, bersih, tentu dengan sendirinya akan membuat warga sekolah nyaman. Dan itu yang saya lakukan,” katanya.

Di SMP N 1 Sumber, berdiri megah panggung teater untuk menunjang ekstrakurikuler. Didin begitu amat peduli terhadap

tumbuh kembang siswa melalui kreativitas. Terlebih terdapat 23 ekstrakurikuler yang saat ini aktif. Dalam waktu dekat, Didin juga berencana membuat lapangan futsal.

“Karena kita punya banyak organisasi ekstra. Jadi perlu penambahan lapangan pagi, lahan masih ada, masih luas juga,” jelas Didin.

Tak lupa pembangunan karakter melalui pembiasaan juga dilakukan agar siswa disiplin, ramah, sopan, dan kritis. Upaya tersebut antara lain dengan meluangkan waktu 10 menit membaca Al-Qur’an sebelum dimulai jam pelajaran. Selain itu, terdapat kegiatan wajib membaca setiap Selasa dan kerohanian pada hari Jumat.

Namun dalam membangun karakter siswa, Didin lebih mengutamakan pembinaan pada guru-guru.

“Jadi setiap pagi, guru menyambut para siswa ketika siswa masuk sekolah. Upaya tersebut agar siswa nyaman,” kata pria kelahiran Sindanglaut 1965 itu.

Berkat upaya tersebut, salah satu siswa SMP N 1 Sumber berhasil meraih juara 1 lomba kaligrafi tingkat provinsi pada tahun 2023 dan akan mengikuti kejuaraan tingkat nasional tahun 2024.

Kepiawaiannya memimpin lembaga pendidikan, menghantarkan Didin juga dipercaya menjadi ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) periode 2018 hingga 2024.

Ia juga aktif dalam penguasaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon sebagai wakil ketua bidang prestasi (Binpres) masa jabatan 2018-2023.

“Saya tidak pernah menjadi atlet, tapi saya yang membina atlet. Saya pernah menjabat wakil ketua binpres,” pungkas pria yang hobi bermusik tersebut. • **Din**

Komarudin, S.Pd

Karir Moncer Hingga Gagasan Metode Minat Baca

Belasan tahun menjadi guru di Bengkulu, akhirnya Komarudin dipindahkan di Cirebon. Beberapa sekolah pernah ia pimpin. Bagaimana kisahnya

Karir cemerlang menjadi dambaan bagi setiap orang. Itulah yang laik disematkan untuk Komarudin. Pria yang saat ini menjabat kepala sekolah SMP N 2 Depok. Sementara kepribadiannya menampilkan optimistis dan murah senyum.

“Memang saya sangat optimis dalam hal apapun. Saya sangat yakin semua hal yang didambakan bisa terwujud,” ujarnya.

Pria lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta itu baru setahun menjabat

kepala sekolah di SMP N 2 Depok.

Sebelumnya, ia telah melanglang buana terlebih dahulu di pulau lain. Di SMP Negeri Bintuhan, Provinsi Bengkulu yang merupakan provinsi kecil, adalah wilayah pertama Komarudin menjadi guru matematika.

“Karir saya awalnya di Bengkulu. Makanya saya sampai punya istri orang sana,” terangnya bercerita.

Setelah menahun di Bengkulu menjadi ASN guru, pada medio 1993 ia pun dimutasi di Cirebon. Tempat pertama ia mengemban tugas adalah SMP N



1 Pabedilan yang dulu bernama SMP Negeri 2 Losari. Tak lama, Komarudin juga berpindah ke SMP N Kaliwedi.

“Setelah pindah ke Cirebon pada 1993, saya di tugaskan di SMP N 1 Pabedilan sebagai guru matematika,” ungkap pemilik hobi musik tersebut.

Belasan tahun menjadi guru, tahun 2010 adalah awal Komarudin diminta menjabat kepala sekolah di SMP Azzahra. Salah satu sekolah swasta di Kecamatan Arjawinangun. Meski sempat menolak terlebih dahulu, akhirnya Komarudin menyetujui kesediannya.

“Awalnya saya tidak mau menjadi kepala sekolah di situ karena khawatir mengganggu jadwal saya di SMP N Kaliwedi. Tetapi ternyata Allah berkehendak lain, saya mau dan ternyata kehadiran saya membawa manfaat. Jumlah murid semakin banyak sampai dua kelas,” tutur pria beranak 4 tersebut.

Tahun 2020, saat pandemi

Covid-19 pertama kali merebak, Komarudin mendapat kabar pergantian jabatan. Ia pun diamanahkan menjadi kepala sekolah di SMP N Losari. Tak kurang dari dua tahun, pada 2022 Komarudin dipindahkan ke Kecamatan Depok.

“Di awal 2022, saya akhirnya pindah ke sini di SMP Negeri 2 Depok,” jelasnya.

Meski belum genap setahun menjabat, perubahan terlihat di SMP N 2 Depok. Salah satunya geliatnya renovasi dan pembangunan. Sebut saja perbaikan parkir, pembenahan jalan, renovasi taman yang menambah keindahan lingkungan sekolah.

“Samping kantor TU juga kami perbaiki parkir yang dulunya tiangnya hanya kayu, sekarang sudah kita ganti baja ringan,” jelas pria yang gemar bermain gitar dan drummer tersebut.

Tak hanya perubahan fisik, Komarudin menginisiasi perubahan metode pembelajaran melalui pementasan hingga hafalan.

“Ini tujuannya untuk membentuk karakter siswa, melalui metode-metode tersebut,” ujarnya.

Selain metode baru untuk siswa, Komarudin menerapkan metode belajar bagi guru yang mengajar yang ia namakan *Leson Study*. Yang memiliki arti belajar dari pembelajaran.

“Saya sudah menerapkan *Leson Study*. Hasilnya ada guru yang sudah mengikuti diklat guru penggerak, PPG dan sebagainya,” terang Komarudin.

Beberapa program unggulan pun tak lupa ia cetuskan. Salah satunya program Redaton atau *reading* maraton (baca cepat).

“Dalam seminggu kita ambil dua hari yakni Rabu dan Jumat untuk Redaton. Semua siswa membaca buku apapun di lapangan,” jelasnya.

Sementara khusus hari Jumat, siswa akan mengaji bersama di lapangan selama beberapa menit, yang dilanjutkan kultum dari guru maupun siswa.

“Kalau di hari jumat kita laksanakan itu. Ini untuk pembinaan mental dan karakter siswa. Supaya siswa bisa mempunyai karakter sendiri,” tuturnya.

Para siswa juga diberi bekal agar mudah menghafal rumus-rumus matematika, bahasa inggris hingga ilmu pengetahuan alam.

“Untuk penguatan penghafalan, kami ada 3 mata pelajaran yang kami beri kepada siswa. Yakni Matematika, IPA dan Bahasa inggris. Kita dorong itu agar siswa-siswi mudah memahami,” tandasnya.

Di luar kesibukannya menjabat orang nomor satu di sekolah, Komarudin tak berhenti meneruskan hobinya dalam bermusik. “Di sini kalau senggang saya juga ikut ngelatih marching band. Jangan dikira nganggur,” katanya terkekeh. •Kus

Rekomendasi Fraksi Perubahan APBD 2022

Fraksi-Fraksi DPRD ingin raperda perubahan APBD 2022 benar-benar sesuai dan tepat sasaran dalam merespon pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.



DPRD Kabupaten Cirebon menggelar paripurna pemandangan umum fraksi terhadap nota pengantar raperda perubahan anggaran APBD 2022. Dalam rapat paripurna, satu persatu juru bicara fraksi-fraksi membacakan pemandangan umum berisi pernyataan, masukan dan pertanyaan mengenai raperda perubahan APBD tahun anggaran 2022.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Mahmudi mewakili Fraksi PKB pun menyampaikan pandangannya. Fraksi PKB meminta data *base* selama tiga tahun terakhir mengenai pembangunan infrastruktur maupun SDM.

Mahmudi berharap, Pemkab Cirebon bisa berinovasi dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) selain mengandalkan pendapatan transfer. Pasalnya selama ini persentase PAD lebih kecil dari pendapatan transfer baik dari pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah.

“Pendapatan dari dana transfer APBN mengalami kenaikan sebesar 27,21 % atau dari Rp 305 miliar lebih menjadi Rp 388 miliar lebih. Sementara target PAD baru mengalami kenaikan 17,90 % atau dari Rp 723 miliar lebih menjadi Rp 754 miliar lebih,” ujarnya.

Selain itu, Mahmudi pun menanyakan skema program penanganan kemiskinan. Menurutnya, belanja bantuan sosial hanya naik 10-11 persen. Jumlah tersebut, lebih kecil dibandingkan belanja barang dan jasa yang diterima.

Giliran Fraksi PDIP disampaikan Syahril Romadhony. Fraksi PDIP mengapresiasi pemerintah daerah atas keseriusan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.

Fraksi PDIP memahami proses ikhtiar dalam me-



ningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan waib melaksanakan nilai akomodatif secara aktif kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip akuntabel dan profesionalis.

Selanjutnya, Fraksi Golkar menanyakan capaian pemerintah daerah dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. Dimana merupakan salah satu prioritas dalam penyusunan perubahan APBD 2022.

Fraksi Golkar meminta agar Kabupaten Cirebon memperbaiki model kebijakan pembangunan di sektor ekonomi yang inklusif berkeadilan dan berkelanjutan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan

pembangunan SDM di tahun 2022. Pasalnya tahun ini tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Cirebon dinilai masih sangat rendah.

Mereka juga menyoroti pegawai ASN di lingkungan pemerintah yang tidak didukung dengan peningkatan *upgrade skill* untuk menunjang akselerasi percepatan realisasi pembangunan dan pelayanan yang efektif.

Fraksi Gerindra memberikan pandangan mengenai perubahan APBD 2022. Pertama mempertanyakan kebijakan makro yang ditempuh dalam upaya pemulihan ekonomi untuk mengangkat daya beli masyarakat.

Kedua, meminta transparansi upaya yang dilakukan pem-

da dalam meningkatkan PAD. Sebab upaya optimalisasi PAD yang dilakukan pemda melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi prakir dan lain-lain masih belum maksimal.

Ketiga, meminta tambahan belanja daerah perubahan APBD 2022 agar berpihak pada pendidikan, ekonomi, kesehatan, kerakyatan dan peningkatan akses.

Selanjutnya, pandangan umum Fraksi Partai Nasdem disampaikan Titi Sumanti. Mereka menyarankan agar pemerintah tak perlu memberikan program peningkatan perekonomian masyarakat untuk memulihkan dampak pandemi covid-19 dan dampak kenaikan BBM.

Selain itu, Titi mengingatkan, agar perencanaan kegiatan APBD murni harus dipastikan tidak terjadi kesalahan. Baik dari jenis belanja, objek belanja, volume, satuan harga satuan dan tolok ukur kinerja.

Ia pun menanyakan realisasi penyerapan APBD murni. Apabila akan menambah anggaran berdasarkan kompleksitas waktu dan kegiatan. Selain itu, Fraksi Nasdem berharap agar ASN mencatat pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam perubahan APBD 2022.

Terakhir pandangan dari Fraksi PKS yang disampaikan Ahmad Fawaz. Ia menanyakan kebijakan pemda yang akan dituangkan dalam perubahan APBD 2022 menghadapi kenaikan harga BBM subsidi. Fawaz juga mengkritik alasan naiknya pengeluaran belanja hibah dan relevansinya dengan delapan program prioritas daerah.

Fraksi PKS berharap penambahan anggaran bantuan sosial harus menjadi prioritas untuk mengurangi dampak kenaikan BBM subsidi. Dan juga perbaikan validitas data DTKS. •Iz

Dukung Perubahan Klinik Jasa Prima Jadi Rumah Sakit

Mulai beroperasi sejak 2018, Klinik Jasa Prima kini tengah berkembang menjadi rumah sakit umum swasta. Seperti Apa?



Klinik Jasa Prima yang beralamat di Jalan Pilang Raya, Kecamatan Kedawung, saat ini sedang melakukan proses pembangunan untuk berkembang menjadi rumah sakit. Hal ini menjadi sorotan bagi Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon.

Sejak pertama kali beroperasi pada tahun 2018, Klinik Jasa Prima mengalami perkembangan yang cukup pesat. Terlihat seluruh fasilitas klinik telah lengkap dan layak menjadi

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Anton Maulana mengapresiasi perkembangan Klinik Jasa Prima. Ia menyebut, klinik tersebut bisa menjadi contoh bagi pelaku usaha di bidang serupa.

“Saya rasa semua ini memiliki dampak positif. Semua berjalan dengan baik, dan tersistem dengan baik. Sepertinya Klinik Jasa Prima bisa jadi ikon atau

contoh untuk pelaku usaha dalam sektor kesehatan lainnya,” ujar Anton, saat sidang.

Politisi Fraksi Golkar itu juga menyoroti kebersihan sekitar klinik. Mengingat usaha tersebut berada di bidang kesehatan, maka sudah seharusnya kebersihan harus diutamakan, agar bisa memberi kenyamanan kepada masyarakat yang ingin berobat.

“Dalam hal ini kami ingin memastikan pengelolaan limbahnya. Jangan sampai tidak terurus hingga mengganggu pasien atau warga setempat,” jelasnya.

Anton juga ingin memastikan Klinik Jasa Prima telah memiliki legalitas yang resmi dan menjalani proses administrasi dengan baik. Hal itu bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain.

“Kami juga memastikan proses perijinannya, pengelolaannya seperti apa dan sejauh ini masih ter-



pantau baik, kemudian alhamdulillah ini menjadi contoh yang baik untuk perusahaan lain,” kata Anton.

Sementara itu, pemilik Klinik Jasa Prima Hj. Ratu Ayu Suhartini mengungkapkan sangat senang atas perhatian dan kepedulian dari Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon. Ia menuturkan klinik ini merupakan bentuk kepeduliannya pada masyarakat yang kurang mampu.

“Ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa untuk

saya. Banyak hal yang ditanyakan diantaranya mengenai administrasi legalitas, tapi berkat alhamdulillah Klinik Jasa Prima telah memiliki legalitas yang resmi,” ungkap Ratu.

Ia juga menambahkan, Klinik Jasa Prima dipastikan tidak melewati proses izin administrasi kenegaraan. Ratu menginginkan, Klinik Jasa Prima bisa memberi manfaat bagi masyarakat luas yang ditempuh dengan cara yang baik.

“Kita memenuhi semua le-

galitas yang berkaitan dengan administrasi secara kenegaraan, tidak melewati satupun izin resmi yang berkaitan dengan operasional klinik,” tambahnya.

Selain itu, Ratu juga menjelaskan, Klinik Jasa Prima dibangun bukan hanya semata untuk bisnis, namun merupakan bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat yang kurang mampu. Ia juga berharap Klinik Jasa Prima bisa menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu saat memerlukan pengobatan.

“Saya membangun usaha bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi juga untuk melayani masyarakat terutama yang tidak mampu,” jelas Ratu.

Saat ini Klinik Jasa Prima sedang berupaya untuk berkembang agar bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat yang memerlukan pengobatan. Ratu sedang menempuh perubahan klinik menjadi rumah sakit swasta.

“Kami juga sedang mengembangkan Klinik Jasa Prima ini untuk menjadi Rumah Sakit Jasa Prima. Saya mohon doa restu untuk kelancaran pembangunan klinik ini menjadi rumah sakit,” kata Ratu.

Pembangunan tersebut saat ini sudah hampir selesai. Mengetahui itu, Anton berharap Klinik Jasa Prima akan terus berinovasi serta meningkatkan kualitas pelayanan sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.

“Saya kira semuanya sudah baik, dari fasilitas ruangnya, pelayanannya, apalagi sedang membangun untuk dijadikan rumah sakit kan di sebelah, jadi saya harap ini akan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. Kami Komisi III sangat mendukung,” pungkas Anton. •par.

Ketuk Palu Perubahan APBD 2022

Perubahan APBD 2022 akhirnya disahkan dalam paripurna. DPRD Kabupaten Cirebon berharap Pemkab Cirebon dapat menyelesaikan program skala prioritas yang telah dicanangkan.



Setelah mendengar jawaban Bupati Cirebon atas pemandangan fraksi DPRD Kabupaten Cirebon terhadap raperda perubahan APBD tahun anggaran 2022, DPRD Kabupaten Cirebon kembali menggelar paripurna bersama Bupati Cirebon.

Dalam rapat paripurna ini, agenda yang dibahas yakni persetujuan DPRD terhadap raperda perubahan APBD 2022.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon H Sofwan ST mengatakan, secara normatif penyusunan dan pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 Kabupaten Cirebon sudah memenuhi aspek yuridis normatif. Namun ada hal yang perlu dilakukan perbaikan dan disempurnakan.

Sofwan menjelaskan, dasar pembahasan ini berdasarkan naskah nota hantaran Bupati Cirebon tentang raperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 beserta seluruh lampirannya yang disampaikan pada rapat paripurna tanggal 15 September.

Selain itu, dasar yuridis lainnya peraturan pemerintah dan seluruh peraturan daerah. Sofwan menerangkan, pembahasan rapat anggaran telah dilakukan pada 19 September hingga 21 September 2022.

Banggar juga telah menggelar rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tim anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dalam paparannya, Sofwan melaporkan APBD 2022 yang semula Rp 3,4 triliun diusulkan Pemkab Cirebon untuk bertambah menjadi Rp 4,27 triliun.



“Yang artinya naik Rp 8,5 miliar,” papar Sofwan.

Adapun rinciannya yakni pertama, pendapatan dan belanja daerah yang semula dialokasikan Rp 3, 37 triliun bertambah Rp 594 miliar 976 juta. Sehingga naik menjadi 3,9 triliun.

Selanjutnya, pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan semula Rp 104, 3 miliar bertambah Rp 258 miliar 596 juta lebih. Sehingga jumlah pendapatan daerah menjadi Rp 362,9 miliar.

Sementara pengeluaran pembiayaan yang semula diusulkan

Rp 5,2 miliar tak bertambah atau tetap. Jumlah pembelian netto Rp 357, 7 miliar.

Diakhir pemaparannya, Sofwan mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon harus bisa memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran dengan sebaik mungkin. Serta bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk segera meraliasi program-program yang telah direncanakan.

“Pemkab Cirebon harus memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran belanja untuk mendanai program dan kegiatan ska-

la prioritas,” jelas Sofwan.

Program prioritas yang dimaksud yakni seperti pengelolaan sampah, penanggulangan banjir, layanan kesehatan, penyelesaian infrastruktur, pemulihan sektor ekonomi dan pembangunan berbasis kewilayah serta program-program lainnya.

“Banggar menyepakati semua hal ini sebagai wujud sinergitas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memajukan pembangunan di Kabupaten Cirebon,” tutur Sofwan.

Meski demikian, proses evaluasi harus terus berjalan sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu yang tidak begitu lama. Sehingga program kegiatan dari seluruh perangkat daerah yang bersumber dari perubahan APBD tahun anggaran ini dapat segera terealisasi.

“Itu harapan kami sehingga sinergitas Pemda dan DPRD terus terjalin,” jelasnya.

Sebelumnya, raperda perubahan APBD 2022 telah melewati berbagai proses dan tahapan. Seperti hantaran Bupati, pandangan fraksi-fraksi, jawaban Bupati atas pandangan fraksi serta pembahasan tim banggar DPRD.

Bupati Cirebon Drs H Imron M.Ag menyampaikan terimakasih kepada jajaran DPRD Kabupaten Cirebon yang telah berperan aktif dan dapat bekerja sama dengan baik. Sehingga dapat bersama-sama mengesahkan perubahan APBD 2022.

“Kita berharap perubahan APBD 2022 akan mempercepat program yang belum terealisasi,” tandasnya.

Setelah disahkan, selanjutnya raperda perubahan APBD 2022 akan dikirim ke tingkat provinsi menunggu penilaian dari Gubernur Jawa Barat. •Kus

Perda Pengelolaan Sampah Disahkan

Setelah melalui tahapan paripurna, Perda tentang Pengelolaan Sampah akhirnya resmi disahkan pada paripurna DPRD . Apa harapannya?



Sampah menggunung dan berserakan, hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Cirebon.

Hampir seluruh desa di Kabupaten Cirebon memiliki persoalan serupa: belum adanya tempat pembuangan sementara (TPS) dan ketidakmampuan mengelola sampah.

Meski upaya pengangkutan sampah dari TPS menuju tempat pembuangan akhir (TPA) telah dilakukan, namun tidak semua sampah dapat terangkut dan ditampung.

Persoalannya, diakui karena minimnya armada

pengangkut dan terbatasnya TPA.

Sebelumnya hanya TPA Gunung Santri di Desa Kepuh yang menjadi tumpuan pembuangan sampah. Keadaan itu diperparah karena TPA Gunung Santri statusnya masih sewa dan hampir *overload*.

Setiap sore, DLH akan melakukan penyemprotan secara intens dan menimbun tanah baru untuk menghindari bau busuk di TPA Gunung Santri.

“Tiap tahun kita perpanjang masa sewanya. Kalau sewaktu-waktu pemerintah Desa Kepuh sudah tidak mengizinkan, ya sudah Cirebon tak punya



TPA sampah lagi,” ujar Fitroh Suharyono, Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon.

Sampah terburuk yang tidak dapat diolah lagi, akan diangkat menggunakan armada menuju TPA Gunung Santri.

Menurut Fitroh, sampah yang ada di TPA Gunung Santri, baru 10 persen dari total sampah yang dihasilkan.

“Setiap hari per orang menyumbang sampah sekitar 0,54 kg. Kalau ditotal sekitar 1.198 ton masyarakat menghasilkan sampah per harinya,” ujarnya.

Sementara DLH hanya mampu mengangkut 100 ton per hari ke TPA. Selebihnya, ada yang dibakar maupun ditimbun langsung di TPS masing-masing.

DLH memprediksi, umur TPA Gunung Santri tak akan bertahan lama. Oleh karenanya ia berharap penanganan sampah harus mulai dilakukan secara serius oleh semua pihak.

Oleh karenanya, sejak pertengahan 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mulai merealisasikan pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Desa Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon, Iwan Rizky, mengatakan, tahap awal pembangunan dan sarana penunjang TPA Kubangdeleg sudah dianggarkan senilai Rp20 miliar.

Anggaran sebesar itu, sesuai rencana awal adalah untuk pengerjaan TPA dan akses jalan

menuju ke TPA Kubangdeleg.

Mengaca pada peraturan bupati, sebenarnya penanganan sampah merupakan kewajiban bersama semua pihak. Baik Pemkab, DPRD, camat, pemdes dan masyarakat memiliki kewajiban untuk bersinergi mengentaskan sampah.

Memasuki Oktober 2022, DPRD Kabupaten Cirebon pun mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah.

Sebelumnya perda sampah, merupakan inisiatif DPRD yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) masa kerja 2019-2024.

Persetujuan Perda tersebut disetujui bersama dengan Bupati Cirebon pada paripurna.

Dalam kesempatan itu, Bupati Cirebon Imron mengucapkan terimakasih kepada DPRD Kabupaten Cirebon, terutama kepada Panitia Khusus (Pansus) yang sudah membantu merumuskan dan menyempurnakan perda tersebut.

“Kami ucapkan terimakasih kepada DPRD atas kerjasamanya,” ucapnya.

Imron mengatakan, dalam mewujudkan Kabupaten Cirebon yang sehat dan bersih, diperlukan adanya upaya pengelolaan sampah secara komprehensif, terencana dan terpadu.

“Pengelolaan sampah ini bertujuan untuk mewujudkan budaya hidup bersih,” katanya.

Selanjutnya, perda sampah tersebut, akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi.

Imron berharap, pasca penetapan Perda tentang Pengelolaan Sampah, seluruh pihak terutama eksekutif dan legislatif dapat mendukung pelaksanaan Perda. •Mir

Panambangan Bakal Hadirkan Wisata Arung Jeram

Sepanjang 3,5 kilometer Sungai Cimanis di Desa Panambangan, akan segera dibangun wisata adrenalin. Tahun depan direncanakan beroperasi. Seperti apa?



Sungai jernih mengalir mengitari bibir desa. Perbukitan dan persawahan menjadi pemandangan yang didapatkan saat berkunjung di Desa Panambangan, Kecamatan Sedong.

Melihat potensi sumber daya alam yang melimpah ruah, tak ingin disia-siakan begitu saja oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Panambangan. Mereka berkeinginan keberadaan Sungai Cimanis yang jernih dapat terasa manfaatnya selain untuk mengairi persawahan.

Sekretaris Desa Panambangan Mijoyo mengatakan, telah merencanakan pembangunan wisata arung jeram setelah menerima saran dari Badan Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) serta Dinas Pemuda dan Olahraga

(Dispora) Kabupaten Cirebon.

“Saat Bapelitbangda dan Dispora berkunjung ke desa kami, mereka menyarankan untuk membangun arung jeram di Sungai Cimanis, dan kebetulan ide tersebut sesuai dengan visi-misi Pak Kuwu,” ungkap Mijoyo.

Tak hanya sebatas wacana belaka, Pemdes Panambangan ingin menyeriusi pembangunan arung jeram tersebut. Hasrat memiliki wisata yang dapat meningkatkan pendapatan desa pun semakin besar, setelah Sungai Cimanis dinyatakan layak untuk dijadikan wisata arung jeram.

“Bulan Juni kemarin sudah dilaksanakan uji kelayakan oleh tim survei dari Kabupaten Bandung Barat, dan Sungai Cimanis dinyatakan layak untuk



Mijoyo (Sekdes Panambangan)



dibuat arung jeram dengan panjang rute 3,5 km," kata Mijoyo.

Namun ada beberapa catatan sebelum arung jeram dibangun. Diantaranya pentingnya menjaga ekosistem dan harus memastikan kualitas fasilitas dan safety arung jeram sesuai dengan standar.

Setelah dinyatakan layak, Mijoyo menuturkan, Pemdes Panambangan langsung melakukan rapat dengan beberapa lembaga dan tokoh masyarakat.

"Saat itu rapat dihadiri oleh camat, kapolsek dan tokoh masyarakat. Selain itu beberapa investor juga turut hadir, seperti

dari Bank Indonesia, Bank BJB, BRI dan Mandiri," tutur Mijoyo.

Saat ini tahapannya telah memasuki proses perizinan. Dan kemungkinan akan cukup banyak memakan waktu. Meski demikian, Pemdes Panambangan akan terus berusaha agar pembangun wisata arung jeram segera dapat terealisasi.

"Kemarin juga sudah koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait rencana pembuatan arung jeram, dan pihak BBWS menyambut baik. Kemungkinan perizinan baru akan keluar setelah 3 bulan," ungkap Mijoyo.

Untuk membiayai pembangun arung jeram, beberapa slot anggaran telah disiapkan. Pemdes Panambangan telah mengalokasikan anggaran dari dana desa sebesar Rp 200 juta untuk tahun 2023. Sementara kecamatan pun telah menyiapkan dana PIK sejumlah Rp 200 juta.

Dengan anggaran tersebut, Pemdes Panambangan menilai cukup untuk mulai membangun arung jeram. Spot-spot foto pun akan disediakan dengan tambahan fasilitas untuk menunjang kenyamanan para pengunjung.

Pemdes Panambangan menargetkan, wisata arung jeram akan mulai dibuka tahun depan. Jika rencana tersebut terlaksana, maka Desa Panambangan berhasil memiliki arung jeram pertama di Cirebon.

"Jika dana desa dan dan kecamatan itu cair, kita akan segera garap. Kita targetkan Mei 2023 sudah mulai buka. Dan seperti ini pertama di Kabupaten Cirebon," jelasnya.

Selain memastikan pendirian arung jeram, Pemdes Panambangan juga berupaya menggali wisata kuliner dan Bukit Pejaten. Mereka berkeinginan meningkatkan PADes.

"Kedua potensi ini nanti akan menjadi alternatif jika musim kemarau tiba karena debit air sungai turun," ungkap Mijoyo.

Namun untuk sementara ini, Pemdes Panambangan ingin fokus merealisasikan arung jeram terlebih dahulu. Sejauh ini mereka tengah menempuh perizinan dan pembuatan *master plan*.

"Pak Kuwu sendiri tidak ingin rencana arung jeram ini hanya menjadi wacana belaka, maka dari itu beliau terus mendesak agar perizinan dan *master plan* segera diselesaikan. Dan kami yakin akan segera terwujud," katanya. •Par

Gembongan Akan Punya Taman Anggur

Pemdes Gembongan akan ubah tanah titisara seluas 7 hektare menjadi taman anggur impor. Seperti apa?



Tak banyak yang tahu, Desa Gembongan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon ternyata memiliki potensi perkebunan yang cukup bagus. Berada di pinggir sawah dan jauh dari hingar-bingar jalan raya membuat udara di desa ini pun terbilang asri.

Melihat potensi tersebut, Pemdes Gembongan berupaya memanfaatkan tanah titisara seluas 7 hektare milik desa untuk ditanam anggur impor.

"Tanah titisara sepanjang jalan menuju desa hingga perlintasan kereta api berbatasan dengan Desa Dompuyongkulon akan kita tanam anggur," ujar Kuwu

Desa Gembongan Sobirin.

Anggur itu rencananya akan didatangkan dari negara Jepang yang diyakini memiliki kualitas bagus dan terjamin.

Untuk konsepnya, Sobirin akan membuat taman anggur yang dilengkapi saung dan kolam lele. Ia terinspirasi dari desa tetangga yang berhasil membuat wisata panorama di pematang sawah.

Menurut Sobirin, Desa Gembongan memiliki lahan gambut sehingga sangat tepat untuk ditanam anggur. Ia pun telah menyiapkan tanah dan pupuk kompos agar tanaman anggur dapat subur dan mampu panen

2 hingga 3 kali dalam setahun.

"Kita sudah siapkan obat penyubur tanamannya," kata Sobirin.

Sobirin menjelaskan, anggur impor yang akan ditanam merupakan bisnis menggiurkan karena memiliki harga fantastis.

"Anggur impor harga standar bisa sampai Rp 200 ribu per kg," jelasnya.

Sobirin mengaku telah bekerjasama dengan supermarket sekitar yang akan siap menampung anggur saat panen.

"Berapapun kita panen sudah ada tempat buangnya di supermarket yang telah MoU dengan kami," ungkapnya.

Meski demikian, saat ini terdapat kendala ringan. Pemdes Gembongan belum menemukan pengelola yang ulet.

"Saat ini kendala kita belum ada penjaga yang benar-bener mau ngurus taman anggur nantinya. Kita sedang cari dan desa siap memfasilitasi upahnya," tutur Sobirin.

Ia pun membuka peluang untuk masyarakat Desa Gembongan yang berminat menjadi pengelola taman anggur. Selain itu bagi masyarakat yang berkeinginan menanam anggur di rumah, desa siap memfasilitasi.

"Kita persilahkan buat nanam, bibitnya dari desa nanti. Kemarin kita sudah coba tanam di MTS Negeri 1 Cirebon pada perayaan kemerdekaan," katanya. •Kus

Kaliwulu

2023, Targetkan Perbaikan Jalan

Hampir 80 persen jalan di Desa Kaliwulu mengalami kerusakan. Pemdes Kaliwulu pun menargetkan perbaikan jalan di tahun depan.

Sebagian besar ruas jalan di Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, mengalami kerusakan parah. Kondisi demikian membuat banyak warga yang mengeluh karena selain mengganggu aktivitas perjalanan, juga telah banyak memakan korban.

Pemerintah Desa (Pemdes) Kaliwulu pun menyadari hal itu. Kuwu Desa Kaliwulu Prihatiningsih mengatakan, ada sekitar 80 persen kondisi jalan di Desa Kaliwulu yang rusak dan belum diperbaiki. Penyebabnya, dua tahun terakhir dana desa difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Memang belum bisa kita perbaiki. Karena dana desa kami yang terbatas setelah pandemi kemarin,” ujarnya.

Namun Prihatiningsih tidak tinggal diam. Menurutnya, Pemdes Kaliwulu telah merencanakan perbaikan jalan desa untuk tahun anggaran 2023.

Meski belum menetapkan jumlah anggaran yang akan disiapkan untuk perbaikan jalan, namun ia memastikan pembenahan jalan mulai dilakukan di tahun depan. Dalam waktu dekat, ia akan mengukur berapa panjang jalan desa yang akan diperbaiki. Setelah itu, akan dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa (musdes).

“Sekarang kita belum musdes



jadi belum memastikan berapa luas jalan yang dapat diperbaiki menyesuaikan dengan kemampuan dana desa kita. Pengukuran jalan juga baru akan dilakukan akhir tahun 2022,” ujarnya.

Selain jalan desa, kata dia, jalan milik kabupaten yang berada di Desa Kaliwulu juga hancur parah. Banyak lubang-lubang yang menganga. Kondisi demikian membuat Prihatiningsih menerima banyak keluhan dan aduan dari warga.

“Kondisi jalan di situ lebih parah. Banyak yang mengeluh ke saya, tapi itu kan jalan milik

Pemkab Cirebon jadi kami tidak punya kewenangan,” jelasnya.

Oleh karenanya, ia pun meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat memperhatikan jalan penghubung antara Kecamatan Plered dengan Kecamatan Jamblang tersebut. Prihatiningsih berharap jalan yang rusak itu segera diperbaiki dengan menggunakan beton agar tidak mudah rusak kembali.

“Semoga bisa segera terwujud untuk perbaikan jalan di tahun depan. Agar akses jalan masyarakat semakin mudah,” pungkasnya. •Muiz

Luwung

Semua Pelayanan Sudah Digital

Seluruh pelayanan di Desa Luwung cukup dilakukan dengan sekali klik karena hadirnya sistem digital. Bagaimana bisa?



Dikenal akan keberadaan makam keramat, Desa Luwung, Kecamatan Mundu, juga ingin masyhur karena cita-citanya mewujudkan desa digital.

Sejak 2 tahun lalu, Pemerintah Desa (Pemdes) Luwung telah membangun sebuah sistem aplikasi pelayanan daring. Segala pelayanan publik warga cukup dilakukan melalui gawai.

"Aplikasi pelayanan daring ini memang sudah berjalan setahun ini," ujar Kuwu Desa Lu-

wung Tajudin.

Aplikasi tersebut, diakui berisi seluruh data penduduk warga Desa Luwung.

"Sekitar 95 persen data penduduk telah kita input di aplikasi," tuturnya.

Tujuannya, kata Tajudin, data penduduk digunakan untuk akses masuk aplikasi. Sehingga data NIK warga yang terinput, dapat menggunakan aplikasi untuk keperluan surat yang dibutuhkan.

Di antaranya, surat permohonan pembuatan KTP, surat

keterangan usaha (SKU) dan administrasi lainnya.

Tak hanya data penduduk, aplikasi tersebut juga dapat melayani pembayaran pajak maupun untuk pelayanan Pusat Kesehatan Sosial (Puskesmas).

"Aplikasi itu bernama Larisa yang sudah bisa diunduh dari Playstore dan Appstore," kata Tajudin.

Untuk memudahkan warga mengakses pelayanan digital, Pemdes Luwung juga menyiapkan perangkat desa untuk membantu masyarakat yang kesulitan.

"Sekarang kebutuhan persuratan masyarakat dan pemdes dimudahkan. Tinggal keperluan suratnya saja, warga tinggal klik," ungkap Tajudin.

Meski demikian, diakui sistem tersebut belum sepenuhnya mutakhir. Akan ada inovasi lainnya yang akan ditambahkan. Seperti pengelolaan Bumdes berbasis digital.

"Jadi nanti sama kaya aplikasi Gojek dan semacamnya, namun kalau kita hanya skala kecil," ungkap Tajudin.

Tajudin berharap, dengan adanya sistem digital akan dapat mempermudah pelayanan publik.

"Saya juga berharap warga Desa Luwung bisa segera melek digital dan mulai bersiap dengan masa yang akan datang," pungkasnya. •Soy

Playangan

Resmikan Wisata Khas Bahari

Wisata air Pesona Bahari semula hanya balong kumuh yang dipenuhi semak belukar. Kini jadi wisata indah milik desa. Seperti Apa?

Baru-baru ini Pemerintah Desa Playangan, Kecamatan Gebang, melalui Bumdes Kuncup Mekar meresmikan wisata air bernama “Pesona Bahari”. Wisata tersebut merupakan upaya Pemerintah Desa Playangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Wisata Pesona Bahari dibangun sejak April 2022 silam. Sebelumnya, tempat tersebut merupakan tanah titi sara berupa balong kumuh yang dipenuhi semak belukar. Namun di tangan Sobirin, Kuwu Desa Playangan, tanah yang dipenuhi semak belukar diubah menjadi tempat wisata yang nyaman untuk keluarga.

“Sekarang balongan yang awalnya kumuh sudah berubah jadi objek wisata yang bersih dan indah,” ujar Sobirin.

Ia pun berkeyakinan, wisata Pesona Bahari akan menjadi magnet wisatawan lokal. Pasalnya, selain memiliki akses jalan yang mudah, Pesona Bahari juga menawarkan beberapa fasilitas yang akan membuat pengunjung merasa nyaman dan betah.

Sebut saja, ada wahana sepeda air, kolam pemancingan dan kafe untuk bersantai para pengunjung.

“Pokoknya sebisa mungkin saya ingin pengunjung betah,” ungkap Sobirin.

Sobirin berharap, wisata tersebut akan mampu memberi manfaat bagi warga sekitar. Ia menuturkan



akan terus berinovasi agar wisata Pesona Bahari terus berkembang. Kedepannya, Sobirin ingin para pelaku UMKM dapat berjualan di sekitar lokasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

“Nanti kita bantu penjualan hasil laut atau usaha masyarakat dengan membuka *stand* sekitar wisata, sehingga masyarakat juga mendapatkan penghasilan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua BumDes Kuncup Mekar Nur Amar men-

jelaskan, Pesona Bahari merupakan salah satu program kerja kepala desa yang konsisten dan berkomitmen dalam berupaya memajukan Desa Playangan.

Di hari pertama diresmikan, warga Desa Playangan dapat menikmati seluruh fasilitas wisata Pesona Bahari secara gratis.

“Sesuai perintah Pak Kuwu, khusus warga Playangan boleh menikmati fasilitas wisata ini secara gratis di hari pertama pembukaan,” pungkasnya. •Par



Parkir Bus

September 2004, Jacques Santini dibuat geram oleh frase 'parkir bus'. Adalah Jose Mourinho yang pertama kali mengatakan frase itu. Ia mengkritik taktik Santini saat menukangi Tottenham Hotspur dalam lawatan ke kandang Chelsea, yang kala itu dilatih Mourinho.

Taktik Santini yang memarkir 10 pemainnya di depan gawang, membuat Mourinho kesal. Pasukannya tak mampu menembus pertahanan Hotspur. Mourinho dipaksa harus menerima hasil 0-0, sambil melabeli taktik Santini dengan parkir bus.

Jadilah: Mourinho kesal, Santini geram. Itulah dinamika sepakbola, menuntut untuk terus berkreatasi dalam teknik dan taktik. Kadang harus parkir bus, kadang juga harus *total football*, semua pemain, termasuk kiper turut penyerang.

Bagaimana dengan pengelolaan pemerintahan, terutama dalam peningkatan pajak dan redistribusi parkir? Manakah yang lebih cocok, parkir bus atau *total football*?

Di era sekarang pergerakan orang dan barang semakin tinggi. Jumlah kendaraan meningkat pesat. Tempat parkir menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan, terutama di pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat, seperti pasar, rumah sakit, pengurusan administrasi kependudukan, hingga kantor kepolisian.

Kondisi ini tentu memaksa pengelolaan parkir harus maksimal. Pertama, ini berkaitan dengan ketertiban umum. Bayangkan jika parkir liar terjadi di ruas-ruas jalan, tentu ini akan mengganggu mobilitas masyarakat, dan bisa menimbulkan kerawanan sosial.

Kedua, parkir yang berserakan juga sangat mengganggu keindahan sebuah daerah. Ini sangat tidak elok untuk para tamu, terutama wisatawan. Dan terakhir, tentu saja tidak terkelolanya pajak dan redistribusi parkir.

Pada titik inilah pengelolaan parkir harus menerapkan strategi *total football*. Kenapa begitu? Karena parkir berkaitan dengan beberapa sektor, mulai dari pendapatan daerah, tata ruang, pariwisata, perhubungan, perdagangan, industri, hingga keama-

nan dan ketertiban umum.

Menertibkan parkir berarti memperlancar mobilitas orang dan barang. Kelancaran lalu lintas juga mempermudah peningkatan industri dan perdagangan. Keindahan tata ruang juga semakin mempercantik destinasi wisata. Sehingga tercipta rasa aman dan ketertiban umum, yang ujungnya mampu meningkatkan pendapatan daerah.

Namun demikian, pada saat yang bersamaan pengelolaan parkir juga harus menerapkan strategi parkir bus. Negara harus kuat menghadapi berbagai dinamika pengelolaan parkir, seperti premanisme dan gangguan keamanan. Jika negara lemah, maka penertiban menjadi sesuatu yang mustahil.

Di sisi yang lain, parkir bus juga sangat berguna dalam menjaga pendapatan negara agar tidak bocor. Harus dibuat sistem yang rapih agar pajak dan retribusi parkir tidak tercecer dimana-mana. Negara harus punya mekanisme pertahanan yang kuat dari segala kebocoran.

Bagaimana caranya agar pertahanan parkir bus menjadi kuat? Semua sektor harus padu. Artinya, pada saat yang bersamaan penerapan parkir bus juga harus diimbangi dengan *total football*.

Sebagaimana juga keberhasilan Chelsea menjuarai Primer League pada musim 2014-2015. Mourinho yang berkesempatan menjadi pelatih Chelsea pada periode kedua justru menerapkan parkir bus. Strategi yang sebelumnya ia kritik, justru ia gunakan untuk kembali menjadi juara.

Ini menunjukkan bahwa sejatinya pertahanan terbaik adalah menyerang. Dengan kata lain, pertahanan dan serangan terbaik adalah keterpaduan semua pemain dalam kesatuan tim. Jadi, kemenangan tercipta jika kita mampu menyerang dan pada saat yang bersamaan bertahan dengan baik.

Nah, untuk itu, agar parkir kendaraan tertib dan meningkatkan pendapatan daerah, kita harus *total football* dan parkir bus secara bersamaan. Jika kita mampu melakukannya, maka penonton (masyarakat) akan bahagia, semua sektor bahagia. Selamat menyambut Cirebon Bahagia.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Mari LESTARIKAN SENI, BUDAYA, & BAHASA CIREBON

- ✓ Pembuatan Perda Pelestarian Budaya
- ✓ Budaya Cirebon Masuk Kurikulum Pendidikan Formal
- ✓ Pengkaderan Penerus Budaya



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Ayo Pada Guyub ! **NINGKATAKEN PRESTASI OLAHRAGA**

- ✓ Pembinaan, pencetakan, dan perlindungan atlet berprestasi
- ✓ Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga